

ANALISIS PENGARUH PENDIDIKAN, UPAH MINIMUM PROVINSI DAN BELANJA MODAL TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN DI SELURUH PROVINSI DI INDONESIA

Muhammad Anshari, Zul Azhar, Ariusni,
Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
Email: muhammadanshari94@yahoo.com

Abstract: *This study aims to determine and analyze the influence of education, provincial minimum wages and capital expenditure on income inequality in Indonesia. This type of research is associative descriptive research, where the data used is secondary data from 2012 to 2017 obtained from related institutions and institutions, which were analyzed using panel regression method. The findings of this study indicate that education has a negative and insignificant effect on income inequality in provinces in Indonesia, provincial minimum wages have a negative and significant effect on income inequality in provinces in Indonesia, capital expenditure has a positive and significant effect on income inequality in provinces in Indonesia. Taken together education, provincial minimum wages, capital expenditure has a significant effect on income inequality in provinces in Indonesia.*

Keywords: *income inequality, education, minimum wage, capital expenditure*

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi merupakan suatu perubahan yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan terencana untuk mendapatkan kondisi masyarakat yang lebih baik serta merupakan suatu tahap yang harus dijalani oleh suatu negara. Setiap negara menginginkan adanya peningkatan standar hidup bagi rakyatnya, salah satunya dengan cara mengidentifikasi potensi-potensi sumberdaya ekonomi yang dimiliki sebagai suatu tindakan aktif yang harus dilakukan oleh suatu negara dalam rangka meningkatkan pendapatan perkapita.

Pembangunan ekonomi pada hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dimana untuk mewujudkan hal tersebut, peran pemerintah sebagai agen pembangunan dan stabilitas ekonomi sangat diperlukan. Kebijakan pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan distribusi pendapatan antar masing-masing wilayah harus melalui perencanaan dan pertimbangan dalam jangka waktu tertentu.

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang terus berupaya melakukan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, melalui berbagai perubahan atau transformasi pendidikan. Salah satunya dalam bentuk pembangunan nasional akan mendorong pembangunan daerah, sedangkan pembangunan daerah dapat memperkuat pembangunan nasional. Jadi pembangunan nasional dan pembangunan daerah mempunyai kaitan yang sangat erat dimana keduanya saling menunjang satu sama lain.

Ketimpangan yang tinggi antar wilayah dapat membawa dampak yang buruk terhadap kestabilan ekonomi dan kestabilan politik suatu negara. Oleh karena itu perlu diupayakan berbagai kebijakan agar ketimpangan yang terjadi antar wilayah tidak terlalu mencolok. Akan tetapi untuk mengurangi ketimpangan pendapatan dalam suatu proses pembangunan ekonomi sangatlah sulit. Terutama disebabkan karena adanya trade off antara ketimpangan pendapatan dengan laju pertumbuhan ekonomi. Karena pembangunan ekonomi memiliki cakupan yang lebih luas yaitu pada kualitas proses pembangunan yang diikuti dengan masalah-masalah umum ketimpangan seperti pengangguran, kemiskinan di daerah pedesaan serta ketidakseimbangan struktural.

Kesenjangan atau ketimpangan antar daerah dapat menimbulkan pengaruh negatif diantaranya terjadi kecemburuan sosial, kerawanan disintegrasi wilayah dan disparitas ekonomi yang semakin lebar dan tajam. Ketimpangan pembangunan yang semakin tinggi itu dapat diatasi dengan konsep pemerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan ke seluruh lapisan masyarakat dan wilayah. Pembangunan disini tidak terbatas

hanya pada pemenuhan kebutuhan pokok saja, tetapi manusia mempunyai kebutuhan lain yang sangat banyak dan luas jenisnya. Adanya perkembangan pemikiran yaitu terdapat pendekatan pertumbuhan dengan stabilitas (*growth with stability*), yang pada hakikatnya menghendaki masyarakat lebih adil menempatkan peranan sumber daya manusia (SDM) pada posisi yang utama dalam pembangunan, baik sebagai konsumen maupun sebagai faktor produksi.

Masalah ketimpangan di Indonesia secara nyata dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi antara Kawasan Barat Indonesia dengan Kawasan Timur Indonesia. Secara umum persoalan pembangunan negara sedang berkembang tidak hanya menyangkut pencapaian tingkat pertumbuhan saja, tetapi juga harus memperhatikan aspek distribusi dan pemerataan hasil pembangunan. Sehingga hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat secara adil dan proporsional, meliputi juga adanya keseimbangan kemajuan antar wilayah.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dilakukan melalui peningkatan mutu pendidikan, derajat kesehatan dan perbaikan gizi, diharapkan akan menumbuhkan inisiatif atau prakarsa untuk menciptakan lapangan kerja baru. Dengan demikian produktivitas nasional dan regional dapat ditingkatkan. Pembangunan harus berdasarkan kemauan dan kemampuan internal dalam masyarakat yang bersangkutan, dimana merupakan suatu proses penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas, kontribusi dan partisipasi aktif dan kreatif masyarakat lokal dalam pembangunan.

Permasalahan yang terkait ketimpangan pendapatan merupakan masalah yang ada di setiap negara dan menjadi permasalahan yang terus menerus terjadi, sehingga menjadi isu yang harus segera diatasi. Ketimpangan pendapatan antar wilayah di Indonesia dapat dilihat dari indeks gini yang tidak merata di berbagai Provinsi di Indonesia, yang akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.

Dalam penelitian, Wahyuni dan Monika (2016), yang berjudul "Pengaruh pendidikan terhadap ketimpangan Pendapatan tenaga kerja di Indonesia". Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengaruh pendidikan terhadap pendapatan semakin meningkat seiring meningkatnya distribusi pendapatan (*desil*). Dengan kata lain, penambahan pendapatan karena pendidikan, lebih tinggi pada distribusi pendapatan teratas (*desil ke-9*). Akibatnya, terjadi ketimpangan pendapatan.

Todaro (2011:254), ketimpangan pendapatan adalah distribusi yang tidak proporsional dari pendapatan nasional total di antara berbagai rumah tangga dalam negara. Dengan kata lain, ketimpangan pendapatan adalah perbedaan jumlah pendapatan yang diterima masyarakat sehingga mengakibatkan perbedaan pendapatan yang lebih besar antar golongan dalam masyarakat tersebut.

Indeks Gini merupakan suatu ukuran pemerataan yang dihitung dengan membandingkan luas antara diagonal dan kurva Lorenz dibagi dengan luas segitiga dibawah diagonal. Rasio Gini bernilai antara 0 dan 1. Nilai 1 menunjukkan complete inequality atau perfectly unequal, di mana seluruh penduduk menempati satu lokasi di suatu negara dan tidak ada penduduk di lokasi lainnya. Nilai 0 menunjukkan perfectly equal, yaitu penduduk terdistribusikan sempurna di seluruh wilayah suatu negara. Jadi, semakin besar nilai rasio konsentrasi Gini, semakin besar ketidakmerataan antara antara distribusi penduduk dan jumlah lokasi (BPS 2017).

Ukuran koefisien gini bagi negara-negara yang distribusi pendapatannya sangat timpang berada di antara 0,50 dan 0,70, sedangkan bagi negara yang distribusi pendapatannya relatif merata memiliki koefisien gini antara 0,20 sampai 0,35 (Todaro, 2011: 257).

Metode yang lazim dipakai untuk menganalisis statistik pendapatan perorangan adalah dengan menggunakan kurva Lorenz. Jumlah penerima pendapatan dinyatakan pada sumbu horizontal, tidak dalam arti absolute melainkan dalam persentase kumulatif. Sedangkan sumbu vertical menyatakan bagian dari pendapatan total yang diterima oleh masing-masing persentase kelompok penduduk tersebut. Semakin jauh jarak kurva Lorenz dari garis diagonal (yang merupakan garis pemerataan sempurna), semakin timpang atau tidak merata distribusi pendapatannya.

Secara umum yang menyebabkan ketidak merataan distribusi pendapatan di negara sedang berkembang adalah penambahan penduduk yang tinggi, yang mengakibatkan menurunnya pendapatan perkapita. Selain itu menyebabkan inflasi karena pendapatan terhadap uang bertambah tetapi tidak diikuti secara proporsional dengan penambahan produksi barang-barang, ketidakmerataan pembangunan antar daerah, capital intensif

sehingga persentase pendapatan modal dari harta tambahan lebih besar dibandingkan persentase pendapatan yang berasal dari kerja.

Distribusi pendapatan nasional adalah suatu media yang mencerminkan merata atau timpangnya pembagian hasil pembangunan suatu negara di kalangan penduduknya atau daerahnya (Dumairy, 2004). Dalam menggambarkan ketimpangan pendapatan negara-negara tersebut, dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok besar dimana pengelompokan ini disesuaikan dengan tinggi, sedang, dan rendahnya tingkat pendapatan yang diukur menurut koefisien gini dan tingkat PDRB.

Dalam teori Human Capital (Jhingan, 2004:414) pengertian pembentukan modal manusia adalah proses memperoleh dan meningkatkan jumlah orang yang mempunyai keahlian, pendidikan, dan pengalaman yang menentukan bagi pembangunan ekonomi dan politik suatu negara. Pendidikan merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan sumber daya manusia.

Modal manusia berarti investasi produktif terhadap orang-orang; mencakup pengetahuan, keterampilan, kemampuan, gagasan, kesehatan dan lokasi yang seringkali di hasilkan dari pengeluaran di bidang pendidikan, program pelatihan dalam pekerjaan dan perawatan kesehatan. (Todaro, 2011:447)

Menurut Danim (2003:38) bahwa perolehan pendidikan direferensikan sebagai fungsi dari perolehan pendapatan dimasa depan. Keuntungan pendidikan dapat diukur dalam beberapa bentuk: 1) Pendapatan yang diperoleh dikaitkan dengan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya sebagai hasil pendidikan dan pelatihan. 2) Pemahaman mengenai pola hidup sehat berdampak pada baiknya tingkat kesehatan. 3) Akses dalam kehidupan yang dinikmati oleh orang yang berpendidikan. 4) Kemampuan daya suai lain yang umumnya tidak dimiliki oleh orang-orang yang tidak berpendidikan secara memadai.

Dalam teori ekonomi, upah dapat diartikan sebagai pembayaran atas jasa- jasa fisik maupun mental yang disediakan oleh tenaga kerja kepada para pengusaha (Sadono Sukirno, 2005). Menurut Sumarsono (2003), perubahan tingkat upah akan mempengaruhi tinggi rendahnya biaya produksi perusahaan. Apabila digunakan asumsi bahwa tingkat upah naik, maka akan terjadi hal-hal sebagai berikut. Pertama naiknya tingkat upah akan meningkatkan biaya produksi perusahaan, yang selanjutnya akan meningkatkan harga per unit barang yang diproduksi. Konsumen akan memberikan respon apabila terjadi kenaikan harga barang, yaitu mengurangi konsumsi atau bahkan tidak lagi mau membeli barang yang bersangkutan. Akibatnya banyak barang yang tidak terjual, dan terpaksa produsen menurunkan jumlah produksinya.

Penelitian yang di lakukan Nangarumba (2015), Hasil dari penelitian ini menggunakan dari bentuk fungsional model semi log pada regresi data panel, dimana ditemukan bahwa PDRB dari Sektor Pertanian, PDRB Sektor Jasa, Upah Minimum Provinsi, Belanja Modal, dan juga Kredit Investasi berhubungan negatif dengan besaran ketimpangan Pendapatan. PDRB sektor industri merupakan satu-satunya variabel yang berhubungan positif dengan ketimpangan pendapatan. Sehingga, jika yang ingin diwujudkan adalah pemerataan pendapatan maka diperlukan peningkatan kinerja sektor pertanian dan jasa, peningkatan upah minimum provinsi, peningkatan anggaran belanja modal, dan peningkatan kredit investasi.

Belanja modal pemerintah secara umum dialokasikan untuk membangun sarana dan prasarana yang selanjutnya diharapkan akan dapat mempertinggi intensitas kegiatan ekonomi. Kenaikan aktivitas ekonomi kemudian diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang kemudian akan memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Selain itu, belanja modal pemerintah dalam pelaksanaannya memerlukan tenaga kerja sehingga akan memperbesar penyerapan tenaga kerja, yang berarti pengangguran akan menurun, lebih banyak orang yang bekerja dan memperoleh penghasilan, yang pada akhirnya akan menuju pada perbaikan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Halim (2008:5) Belanja modal yang didefinisikan sebagai belanja/biaya pengeluaran yang manfaatnya lebih dari satu tahun. Belanja modal atau investasi adalah pengeluaran yang manfaat cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah, dan selanjutnya akan menambah anggaran rutin biaya operasional dan pemeliharaan. Pengeluaran ini dilakukan pemda untuk melaksanakan wewenang dan atastanggung jawab nya kepada masyarakat dan pemerintah di atasnya (pemerintah provinsi/pemerintah pusat).

Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah dengan penambah aset tetap atau kekayaan pemerintah yang manfaatnya lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal yang seharusnya dilakukan

oleh pemerintah daerah diantaranya pembangunan dan perbaikan sektor pendidikan, kesehatan dan transportasi. Tersedianya fasilitas pelayanan publik membuat masyarakat akan lebih aktif dan bergairah dalam bekerja serta dengan adanya fasilitas yang baik akan meningkatkan jumlah investasi di masing-masing daerah yang akan mampu mempercepat pembangunan ekonomi sehingga akhirnya akan mengurangi tingkat ketimpangan yang ada (Putri, 2015).

Berdasarkan fenomena dan fakta di atas, untuk mengetahui sejauhmana pengaruh variabel di Indonesia perlu kiranya dilakukan penelitian dengan judul "Analisis Pengaruh Pendidikan, Upah Minimum Provinsi Dan Belanja Modal Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Seluruh Provinsi Di Indonesia"

METODE PENELITIAN

penelitian ini termasuk jenis penelitian deksriptif dan asosiatif, dimana penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis dan mengadakan interpretasi terhadap masing-masing variabel penelitian dengan mengadakan analisis statistik. Penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk melihat adanya hubungan antara variabel bebas yaitu Pendidikan (X1), Upah Minimum Provinsi (X2), Belanja Modal (X3) dengan variaabel terikat yaitu Ketimpangan Pendapatan (Y).

Penelitian dilakukan di Indonesia pada rentang waktu pengambilan tahun 2012-2017 dengan menggunakan data tahunan. Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dari data yang sudah dipublikasikan oleh instansi terkait, yaitu berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, dan Departemen Keuangan Indonesia dimana pada instansi tersebut diperoleh data-data yang akan digunakan dalam penelitian ini. Model yang digunakan dalam analisis penelitian ini adalah Model Regeresi Panel, dimana model yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = 0 + \alpha_1 X_{1it} + \alpha_2 X_{2it} + \alpha_3 X_{3it} + U_{it}$$

Dimana Y adalah ketimpangan pendapatan, X1 adalah pendidikan, X2 adalah upah minimum, X3 adalah belanja modal, i adalah cross section, t adalah time series dan u adalah error term.

Metode odel pooled data adalah metode yang menggabungkan data cross section dan data time series. Menggunakan model panel data mempunyai banyak keuntungan baik secara statistik maupun teori ekonomi. Penggunaan data panel dapat memperlihatkan (country effect) dan menghindari kesalahan penghilangan variabel (omitted variabel bias) dibanding jika menggunakan data cross section, selain itu data panel dapat dimungkinkan untuk menangkap karakteristik antar individu dan antar waktu yang bisa saja berbeda-beda. Penggunaan data panel juga bisa meningkatkan jumlah observasi. Maka akan berimplikasi pada data yang lebih informatif dan variatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemilihan Model Regresi Panel, untuk memilih model yang paling tepat digunakan dalam mengelola data panel, terdapat beberapa pengujian yang dapat dilakukan yakni uji Chow dan uji Hausman.

Tabel 4.1 Hasil Uji Chow Test

Redundant Fixed Effects Tests
 Equation: Untitled
 Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	20,132225 317,74529	(32,162)	0,0000
Cross-section Chi-square	7	32	0,0000

Sumber : Eviews 8 (data diolah, 2018)

Berdasarkan hasil Chow Test pada tabel di atas didapatkan nilai probability sebesar 0,000. Apabila nilai probability lebih kecil dari nilai signifikan ($\alpha=0,05$), maka H0 ditolak dan Ha diterima, sehingga model estimasi panel yang lebih tepat digunakan adalah model Fixed Effect.

Setelah selesai melakukan uji Chow dan didapatkan model yang tepat adalah Fixed Effect, maka selanjutnya kita akan menguji model manakah antara model Fixed Effect atau Random Effect yang paling tepat, pengujian ini disebut sebagai uji Hausman.

Tabel 4.2 Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
 Equation: Untitled
 Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	1,144474	3	0,7664

Sumber : Eviews 8 (data diolah, 2018)

Berdasarkan hasil uji Hausman dengan menggunakan evIEWS 8 di dapat probability sebesar 0,7664. Nilai probability lebih besar dari level signifikan ($\alpha=0,05$), maka H_0 ditolak dan H_a diterima, sehingga estimasi yang terbaik digunakan untuk model ini adalah *Random Effects*.

Hasil Regresi Panel

**Tabel 4.3
 Hasil Estimasi**

Dependent Variable: GINI
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Sample: 2012 2017
 Periods included: 6
 Cross-sections included: 33
 Total panel (balanced) observations: 198
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.736883	0.103542	7.116764	0.0000
LOG(RATA2_LAMA_SEKOLAH)	-0.031831	0.050988	-0.624288	0.5332
LOG(UPAH_MINIMUM_PROVINSI)	-0.039113	0.008049	-4.859228	0.0000
LOG(BELANJA_MODAL)	0.009319	0.004013	2.322219	0.0213
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			0.035187	0.7772
Idiosyncratic random			0.018837	0.2228
Weighted Statistics				
R-squared	0.165772	Mean dependent var	0.078926	
Adjusted R-squared	0.152871	S.D. dependent var	0.020368	
S.E. of regression	0.018747	Sum squared resid	0.068181	
F-statistic	12.85009	Durbin-Watson stat	1.706951	
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.067618	Mean dependent var	0.369652	
Sum squared resid	0.288663	Durbin-Watson stat	0.601675	

Sumber : Hasil Olahan Eviews 8

Hasil pengolahan data sekunder dengan menggunakan program Eviews 8, diperoleh persamaan regresi panel sebagai berikut :

$$Y_{it} = \beta_0 - \beta_1 \log X_{1it} - \beta_2 \log X_{2it} + \beta_3 \log X_{3it} + U_{it} \quad (1)$$

$$Y_{it} = 0.736883 - 0.031831X_{1it} - 0.039113X_{2it} + 0.009319\log X_{3it} \quad (2)$$

Persamaan diatas menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah (X1) berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia dengan koefisien regresinya yakni sebesar -0.031831 persen. Hal ini berarti terjadi penurunan satu persen pada pendidikan maka akan mengurangi laju ketimpangan pendapatan. Sebaliknya bila terjadi peningkatan satu persen pada rata-rata lama sekolah maka akan menambah laju ketimpangan pendapatan sebesar -0.031831.

Upah Minimum Provinsi (X2) berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia dengan koefisien regresinya yakni sebesar -0.031831 persen. Hal ini berarti ketika terjadi peningkatan satu persen pada upah minimum provinsi maka akan menurunkan ketimpangan pendapatan di Indonesia sebesar 0.031831.

Belanja modal (X3) berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia dengan koefisien regresinya sebesar 0.009319. Hal ini berarti ketika terjadi peningkatan sebesar satu satuan pada belanja modal maka akan meningkatkan ketimpangan pendapatan di Indonesia sebesar 0.009319.

Pengaruh Pendidikan Terhadap Ketimpangan Pendapatan seluruh Provinsi di Indonesia, berdasarkan hasil penelitian pada tabel 4.3 dapat dilihat bahwa terdapat pengaruh negatif dan tidak signifikan antara rata-rata lama sekolah dan ketimpangan pendapatan di Indonesia. Artinya setiap peningkatan lama sekolah tidak menyebabkan penurunan terhadap ketimpangan pendapatan. Disini dapat diindikasikan bahwa pendidikan tidak selalu mempengaruhi ketimpangan pendapatan.

Hal ini disebabkan karena pendidikan akan mempengaruhi pendapatan seseorang, dimana pendapatan bisa diukur dengan pendidikan seseorang. Orang yang mendapatkan pendidikan yang tinggi, cenderung memperoleh pendapatan yang tinggi pula, akan tetapi orang yang tamatan perguruan tinggi banyak yang menjadi pengangguran. Pengangguran terjadi karena sulitnya lapangan pekerjaan yang tersedia saat ini, dan pencari kerja yang cenderung menunggu untuk dapat pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya. Pengangguran menyebabkan orang tidak memiliki pendapatan, Hal ini yang kemudian menyebabkan semakin tingginya ketimpangan pendapatan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni dan Monika (2016) yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan memiliki pengaruh untuk mengurangi ketimpangan pendapatan. Pendidikan bisa mengurangi ketimpangan pendapatan. Ketimpangan pendapatan terjadikarena adanya over-education, interaksi antara kemampuan dan pendidikan, serta perbedaan kualitas pendidikan. Sekolah atau jurusan (bidang studi) antar wilayah pendidikan bisa mengurangi ketimpangan pendapatan. Oleh karena itu, pemerintah bisa meningkatkan investasi di bidang pendidikan untuk mengurangi ketimpangan pendapatan.

Jadi disini penulis berpendapat pendidikan bisa berpengaruh negatif dan signifikan apabila lapangan pekerjaan tinggi dan menunjang para pecari kerja dengan tingkat pendidikan tinggi maka baru akan berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan yang terjadi.

Pengaruh Upah Minimum Provinsi Terhadap Ketimpangan Pendapatan Seluruh Provinsi di Indonesia, berdasarkan estimasi pada Tabel 4.3 dapat diketahui bahwa upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Artinya, ketika terjadi peningkatan upah minimum provinsi di Indonesia maka akan menurunkan ketimpangan pendapatan.

Hal ini didapatkan hasil bahwasannya upah minimum provinsi meningkat akan mempengaruhi ketimpangan pendapatan ketika upah naik maka ketimpangan akan turun yang mana, ketika upah meningkat akan meningkatkan daya beli atau konsumsi masyarakat yang berdampak pada peningkatan permintaan barang dan jasa disuatu daerah yang menandakan perbaikan perekonomian yang berujung peningkatan perekonomian di daerah yang akan membuat ketimpangan menjadi rendah antara daerah lain ketika perekonomian daerah cenderung membaik. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin naik upah minimum provinsi maka akan semakin rendah ketimpangan pendapatannya.

Hal yang menyebabkan ketimpangan pendapatan ialah karena daerah-daerah yang dianggap potensial memiliki upah yang jauh lebih tinggi dibandingkan daerah-daerah lainnya, ketidakmerataan inilah yang menyebabkan semakin tingginya ketimpangan pendapatan. Maka sebaiknya pemerintah meningkatkan upah

minimum di daerah yang lebih rendah untuk di samaratakan dengan daerah yang lebih tinggi upah minimumnya.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nangarumba (2015), peningkatan upah minimum provinsi (UMP), akan mengurangi ketimpangan pendapatan dikarenakan. diduga bahwa peningkatan dari Upah Minimum Provinsi akan mengurangi arus migrasi khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan menengah. Berkurangnya arus migrasi didorong oleh teori bahwasanya migrasi terjadi dikarenakan faktor ekonomi, dalam artian peningkatan penghasilan, dimana salah satunya diukur dari upah. Jika upah meningkat maka sebagian tenaga kerja yang berpenghasilan rendah dan menengah diduga akan mengurangi tingkat migrasi dikarenakan daya beli mereka telah bertambah.

Pengaruh Belanja Modal Terhadap Ketimpangan Pendapatan Seluruh Provinsi di Indonesia, berdasarkan hasil estimasi pada Tabel 4.3 dapat dilihat bahwa belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Artinya, ketika terjadi peningkatan belanja modal maka akan meningkatkan ketimpangan pendapatan, namun pengaruh yang diberikan oleh belanja modal terhadap ketimpangan pendapatan signifikan.

Hal ini diduga karena alokasi belanja modal terpusat pada provinsi tertentu yang menyebabkan tidak merata pembangunan infrastruktur ekonomi di Indonesia, yang terpusat pada provinsi tertentu di daerah yang dianggap potensial dibandingkan daerah lainnya, misalnya infrastruktur jalan di daerah bagian barat Indonesia, akan berbeda dengan daerah di timur Indonesia. Di bagian barat Indonesia, banyak terdapat jalan beraspal yang dapat menunjang perekonomian, karena jalan dianggap mampu meningkatkan produktivitas di daerah tersebut. Lain halnya dengan daerah timur Indonesia, yang bahkan masih banyak terdapat jalan tidak beraspal yang dapat mengganggu proses laulintas barang.

Belanja modal yang tidak merata, menyebabkan ketimpangan tinggi karena hanya terpusat pada daerah tertentu yang berpotensi tinggi dan daerah yang tidak potensial cenderung mendapatkan belanja modal lebih rendah yang berujung ketidak merataan pembangunan dan alokasi belanja modal yang tidak merata di seluruh daerah, yang menyebabkan juga lapangan pekerjaan hanya terfokus pada daerah yang lebih tinggi belanja modalnya dan daerah yang lebih rendah belanja modal akan rendah untuk peningkattan terbukanya lapangan pekerjaan dan angka pengguran yang tetap. Ketika pengangguran menurun hanya pada daerah potensial dengan belanja modal yang menurun maka akan terjadi ketimpangan pendapatan di sebabkan oleh belanja modal.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nangarumba (2015) Pada belanja modal akan mewakili pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk infrastruktur. Hal ini dikarenakan penggunaan anggaran belanja modal lebih banyak digunakan dalam kaitannya untuk meningkatkan jumlah dan kualitas infrastruktur. Peningkatan dari belanja modal dan investasi pada bidang infrastruktur akan meningkatkan kualitas dan jumlah infrastruktur, yang kemudian akan diikuti oleh peningkatan produktivitas sektor yang pada akhirnya diharapkan akan dapat mengurangi ketimpangan pendapatan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sabir (2015) Alokasi belanja modal dalam APBD dan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi modal yang negatif dan signifikan terhadap Ketimpangan pendapatan.

SIMPULAN

Penelitian ini mengkaji pengaruh pendidikan, upah minmum provinsi dan belanja modal terhadap ketimpangan pendapatan di seluruh provinsi di Indonesia selama periode tahun 2012-2017. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut :

Pendidikan memiliki pengaruh yang tidak signifikan dan negatif terhadap ketimpangan pendapatan di seluruh provinsi di Indonesia. Artinya setiap peningkatan yang terjadi pada pendidikan tidak menyebabkan penurunan pada ketimpangan pendapatan dan sebaliknya. Hal tersebut menjelaskan bahwa pendidikan yang semakin tinggi tidak akan menurunkan ketimpangan pendapatan, karena masih banyak pengangguran yang memiliki pendidikan yang tinggi, pengguran itu dapat menyebabkan ketimpangan pendapatan.

Upah minimum provinsi memiliki pengaruh yang signifikan dan negatif terhadap ketimpangan pendapatan di seluruh provinsi di Indonesia. Artinya setiap peningkatan yang terjadi pada upah minimum

provinsi akan menyebabkan menurun pada ketimpangan pendapatan dan sebaliknya. Hal tersebut menjelaskan bahwa upah minimum provinsi yang semakin tinggi akan menurunkan ketimpangan pendapatan, karena upah minimum provinsi merupakan faktor penting dalam pemertaan ketimpangan pendapatan.

Belanja modal memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap ketimpangan pendapatan di seluruh provinsi di Indonesia. Artinya setiap peningkatan yang terjadi pada belanja modal akan menyebabkan kenaikan ketimpangan pendapatan dan sebaliknya. Namun pengaruh yang diberikan belanja modal signifikan.

Secara bersama-sama pendidikan, upah minimum provinsi dan belanja modal berpengaruh secara signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di seluruh provinsi di Indonesia. Artinya variabel pendidikan, upah minimum provinsi dan belanja modal secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di seluruh provinsi di Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas maka dalam penelitian ini dapat diajukan saran sebagai berikut, Disarankan kepada pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan serta pembukaan lapangan pekerjaan, karena dengan kualitas pendidikan serta tersedianya lapangan pekerjaan diharapkan mampu mengurangi ketimpangan pendapatan. Disarankan kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan tingkat upah minimum provinsi yang diterima dan melakukan upaya pemerataan upah di setiap daerah di Indonesia yang akan menurunkan ketimpangan. modal guna ketersediaan infrastruktur untuk menunjang perekonomian di Indonesia dan pemerataan alokasi belanja modal yang meyebabkan pemerataan pembangunan dan menurunkan angka pengangguran, sehingga dapat menurunkan ketimpangan pendapatan.

Dalam penelitian selanjutnya perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan melibatkan banyak variabel-variabel yang berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan dan diluar variabel yang telah penulis teliti agar ketimpangan pendapatan dapat lebih diturunkan atau angka ketimpangan ini rendah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincolin. (2004). *Ekonomi Pembangunan* (Edisi 4). Yogyakarta: STIE YKPN.
- Badan Pusat Statistik. 2018. *Statistik Indonesia* (berbagai edisi). Jakarta: BPS.
- Das, Samarjit. et al. (2014). *Economic growth and income inequality: examining The links in indian economy*. *Journal of Quantitative Economics*, Vol. 12, No.1, January 2014
- Danim, Sudarwan. 2003. *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Dumairy. 2004. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2006). *Dasar-dasar ekonometrika*. Jakarta: Erlangga.
- Halim, Abdul. 2008. *Analisis Investasi (Belanja Modal) Sektor Publik- Pemerintah Daerah*. Jakarta : Salemba Empat.
- Jhingan, M.L. 2004. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Putri ,Valentiana Shanty. 2015. *Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan belanja modal terhadap ketimpangan distribusi pendapatan*. 2015. *E-Jurnal EP Unud*, 4 [1] : 41 – 49
- Nangarumba, Muara. 2015. *Analisis Pengaruh Struktur Ekonomi, Upah Minimum Provinsi, Belanja Modal, dan Investasi Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Seluruh Provinsi di Indonesia Tahun 2005-2014*. *JESP-Vol. 7, No 2 Nopember 2015*.
- Raswita, Ngakan Putu Mahesa Eka., dan Made Suyana Utama. (2013). *Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Antar Kecamatan Di Kabupaten Gianyar 2013*. *E-Jurnal EP Unud*, 2 [3] : 119-128

- Rayhchaudhuri, Ajitava. 2010. Trade, Infrastructure and Income Inequality in Selected Asian Countries: An Empirical Analysis. Asia-Pacific Research and Training Network on Trade Working Paper Series, No.82.
- Sabir. 2015. Pengaruh Alokasi Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan, Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 –2013. Disertasi. Program Doktor Ilmu Ekonomi Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Malang.
- Nugroho, Budi Satrio. 2014. Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Antar Kecamatan di Kabupaten Banyumas Tahun 2002-2011. Jejak 7 (1) (2014): 46-59.
- Sutarno, dan Mudrajad Kuncoro. 2004, Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan antar Kecamatan di Kabupaten Banyumas, 1993-2000. Jurnal Ekonomi Pembangunan.
- Sumodiningrat, Dr. Gunawan, M. Ec. 2002. Ekonometrika Pengantar. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Sjafrizal. 2008. Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi. Padang: Baduose Media.
- Sukirno, Sadono. (2006). Pengantar Teori Mikro Ekonomi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kementerian Keuangan. 2018. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Indonesia.
- Kristiyanti, Linda. (2007). Analisis sektor basis perekonomian dan peranannya dalam mengurangi ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur. skripsi Departemen ilmu ekonomi fakultas ekonomi dan manajemen institut pertanian bogor
- Kuncoro, Mudrajad. 2006. Ekonomi Pembangunan. UPP STIM YKPN : Yogyakarta.
- Kuncoro, Mudrajad. 2012. Perencanaan Daerah. Jakarta : Salemba Empat.
- Tarigan, Robinson. 2005. Ekonomi Regional. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Tambunan, Tulus. (2001). Perekonomian Indonesia: Beberapa Masalah Penting. Jakarta : Ghalia Indonesia Erlangga
- Todaro, Michael dan Stephen C Smith. 2011. Pembangunan Ekonomi edisi ke sembilan. Jakarta: Erlangga.
- Wahyuni, Ribus Nurul Tri dan Monika, Anugerah Karta. (2016). Pengaruh Pendidikan Terhadap Ketimpangan Pendapatan Tenaga Kerja Di Indonesia. Jurnal Kependudukan Indonesia | Vol. 11 No. 1 Juni 2016 | 15-28